

PARLEMENTARIA



KORKESRA
Dukungan
Sekolah
Rakyat

Butuh Taruna Keamanan Siber

KOMISI II
Pentingnya
Jaga Persatuan
dan Stabilitas
Nasional

Nomor 1360/II/IX/2025 September 2025



9 772614 339005





FOTO: AIS/PDT

Anggota Komisi I DPR RI Slamet Ariyadi saat peninjauan Komisi I ke PSSN di Ciseeng, Jawa Barat, Kamis (11/9).

Butuh Taruna Keamanan Siber

Anggota Komisi I DPR RI Slamet Ariyadi menyoroti penurunan kuota penerimaan taruna baru di Politeknik Siber dan Sandi Negara (PSSN) yang terdampak efisiensi anggaran. Menurutnya, kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di bidang keamanan siber justru semakin mendesak, sehingga kuota penerimaan taruna tidak seharusnya berkurang.

“Awalnya kuota penerimaan 100 taruna per tahun, tapi hari ini turun menjadi 50. Seharusnya ini tidak boleh terdampak efisiensi. Justru harus ditambah, karena Indonesia sangat membutuhkan SDM berkualitas di bidang keamanan siber,” tegas Slamet usai mengikuti

peninjauan Komisi I DPR RI ke PSSN di Ciseeng, Jawa Barat, Kamis (11/9).

Politisi Fraksi PAN ini menekankan, kebutuhan tenaga ahli siber di Indonesia sangat besar. Ia menyebut, hingga tahun 2030,

institusi pemerintahan baik pusat maupun daerah membutuhkan sekitar 29.000 tenaga di bidang keamanan siber, sementara sektor swasta memerlukan sekitar 9.000 tenaga ahli.

“Oleh karena itu, skema peningkatan kuota taruna baru harus segera dicarikan solusi teknis oleh BSSN maupun PSSN. Kita membutuhkan tenaga yang terampil, berkualitas, dan sesuai kapasitas keahliannya di bidang keamanan siber,” jelasnya.

ais/aha



Scan QR untuk berita selengkapnya



Dukungan Sekolah Rakyat



FOTO: IST/PDT

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 11 Bandung Barat, Selasa (9/9/2025).

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra)

Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan bahwa tidak boleh ada ego sektoral antar kementerian dalam mendukung kehadiran Sekolah Rakyat. Hal ini disampaikan Cucun usai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 11 Bandung Barat, Selasa (9/9).

Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat menjadi langkah strategis negara dalam menghadirkan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ia menilai, fasilitas Sekolah Rakyat di Bandung Barat sudah cukup baik, meski masih perlu peningkatan pada beberapa aspek.

“Masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, seperti ruang belajar atau asrama yang masih padat, juga fasilitas kamar mandi. Sambil berjalan nanti akan kita evaluasi,” ujar Cucun.

Politisi dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II itu menekankan

pentingnya koordinasi lintas kementerian dalam mendukung keberlanjutan Sekolah Rakyat. “Tidak boleh ada ego sektoral. Semua komponen alat bangsa ini, terutama kementerian yang berkaitan dengan pendidikan, harus turun. Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Agama untuk guru PAI-nya, bersama dengan Kementerian Sosial, harus bahu-membahu menumbuhkembangkan Sekolah Rakyat,” tegasnya.

Selain itu, Cucun juga mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah. Menurutnya, dukungan Pemda sangat penting mengingat para siswa merupakan anak-anak daerah tersebut. “Pemerintah daerah harus hadir juga. Bayangkan, pusat sudah hadir, sementara anak-anak ini adalah warga Bandung Barat. Kalau ada pemerintah daerah yang belum memberi perhatian, maka akan kita sampaikan kepada Mendagri untuk dievaluasi,” pungkasnya.



Scan QR untuk berita selengkapnyanya



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI
KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)
WAKIL PENGARAH
Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si. (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
M. Ibnurkhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI
Rizka Arinindya, S.Sos. (Kabubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kabubag Analists Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kabubag Media Sosial)

REDAKTUR
Agung Hidayat, S.I.P., Ridwan Budiman, S.I.P., Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Prima Danurirto, A.Md.,
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI
Tiara Saum, S.I.Kom., Hira Askamal, S.I.Kom., Bianca Destianti, S.I.Kom., Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom., Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom., Naden Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom., Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puritno Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alayudis, Bunga Leonaricha Firda Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien, Yasmim Nabila

FOTOGRAFER
Naefuroji, Jaka Nugraha, Rumi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afhillah, Geraldio Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh Farhan Nur Fikri, Mario Fernandez

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E. (Kabubag Produksi)

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito, Insan Syahrezi, Aan Risdiana, M.Kom.

IT MEDIA DIGITAL
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom., Savant Rifqi Hidayat, S.E., Indah Ekawati, S.I.Kom.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kabubag Distribusi)
Adi Ardiansyah, M.M.

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Handhal Dw Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrissa Dwipa

Telp. 021-571 5697
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Dorong Keadilan Lahan untuk Rakyat

Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menegaskan pentingnya keberanian pemerintah dalam menindaklanjuti persoalan ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia. Hal itu disampaikan saat Rapat Kerja Komisi II dengan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (8/9).

Deddy menyoroti pernyataan Menteri ATR/BPN sebelumnya yang menyebut bahwa sekitar 60 keluarga besar menguasai sebagian besar tanah di Indonesia.

Menurutnya, informasi tersebut harus ditindaklanjuti dengan kebijakan nyata, bukan sekadar pernyataan publik.

“Kalau berhenti hanya jadi statement, itu justru akan menimbulkan kebencian di masyarakat bawah yang mengalami ketidakadilan agraria. Pemerintah harus menunjukkan langkah konkret, baik melalui reforma agraria yang konsisten maupun kebijakan pajak yang adil,” tegas Deddy.

Politisi PDI Perjuangan asal Kalimantan Utara itu menilai, kelompok korporasi besar yang menguasai lahan melalui Hak Guna Usaha (HGU), Hutan Tanaman Industri (HTI), maupun tambang,

sudah saatnya dibebani pajak lebih besar. “Mereka sudah sangat kaya, bahkan cukup untuk 70 keturunan. Negara harus berani menaikkan pajak kepada kelompok ini untuk redistribusi yang lebih adil,” tambahnya.

Selain isu ketimpangan lahan, Deddy juga menyoroti persoalan konflik agraria yang hingga kini masih membebani masyarakat, diantaranya kasus di Tesso Nilo, Riau, di mana terdapat lebih dari 11 ribu kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya di kawasan tersebut. Ia meminta kejelasan dari pemerintah terkait langkah penyelesaian, agar masyarakat tidak semakin terpinggirkan.

Ia mendorong agar penetapan kawasan ke depan tidak hanya melibatkan Kementerian Kehutanan, tetapi juga Kementerian ATR/BPN, Kementerian ESDM, dan Kementerian Dalam Negeri, mengingat konflik yang kerap melibatkan masyarakat desa, perusahaan tambang, dan korporasi besar. ➡ **ssb/aha**



FOTO: IJUM/PDT

Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus saat Rapat Kerja Komisi II dengan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025).



Perkuat Anggaran PTSL

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menekankan pentingnya penguatan dukungan anggaran bagi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (8/9).

Taufan menilai, pelaksanaan PTSL telah mendapatkan respons positif dari masyarakat di berbagai daerah. Menurutnya, kehadiran Komisi II DPR RI bersama Kantor Wilayah ATR/BPN dalam penyerahan sertifikat tanah melalui program ini disambut dengan antusias.

“Terus yang tidak kalah pentingnya, Pak, penyerahan PTSL ini di berbagai daerah, masyarakat luar biasa merespon. Selama ini penyerahannya tetap ada, tapi tidak seremonial. Kehadiran kami dari Komisi II DPR bersama dengan Kanwil ATR/BPN, sangat direspon. Bahkan mereka berbondong-bondong ke kantor desa, meminta perlakuan yang sama,” ujar Taufan.

Ia menekankan bahwa program PTSL memiliki *multiplier effect* yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ia mendesak pemerintah untuk menambah alokasi anggaran PTSL pada tahun anggaran 2026.

“Artinya saya punya pandangan, mudah-mudahan Pak

Menteri bisa memahami, bahwa program PTSL ini harus diberikan anggaran yang lebih dari cukup untuk tahun anggaran 2026. Coba kita bayangkan, sawah, rumah atau lahan yang bersertifikat melalui program PTSL pada akhirnya bisa dijadikan agunan untuk mendapatkan kredit usaha rakyat. Dan tentu hal ini sesuai dengan harapan dari program ini,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Taufan juga mengingatkan bahwa kebijakan nilai zona tanah yang menjadi dasar penetapan PBB-P2 harus memperhatikan aspirasi publik. Hal ini penting agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan beban berlebih bagi

Program PTSL memiliki *multiplier effect* yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ia mendesak pemerintah untuk menambah alokasi anggaran PTSL pada tahun anggaran 2026

masyarakat, terutama di tengah sorotan publik yang belakangan muncul terkait kenaikan PBB di sejumlah daerah. **we/aha**



Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe saat raker dengan Menteri ATR/Kepala BPN, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025).

FOTO: MUN/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya



RUU Perampasan Aset Sejalan dengan RUU KUHAP

Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset harus berjalan seiring dengan pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal itu penting karena KUHAP akan menjadi landasan hukum acara bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan aturan terkait perampasan aset.

"RUU Perampasan Aset sudah diminta oleh masyarakat, direspons oleh Presiden, bahkan diserahkan ke DPR. DPR tentu meresponsnya dengan cepat. Tetapi RUU Perampasan Aset ini harus berjalan paralel dengan RUU KUHAP," ujar Hinca kepada **Parlementaria**, di Kota Jambi, Jambi, Jumat (12/9).

Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, saat mengikuti pertemuan di Kota Jambi, Jambi, Jumat (12/9/2025).

Ia menekankan bahwa keseimbangan antara substansi RUU Perampasan Aset dan kesiapan aparat penegak hukum menjadi kunci utama. Tanpa payung hukum acara yang jelas, menurutnya, pelaksanaan perampasan aset bisa berisiko menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

"Power yang tidak dikontrol cenderung disalahgunakan. Agar tidak terjadi *abuse of power*, maka pengaturannya harus tepat di KUHAP. KUHAP lah yang mengatur mana yang boleh dan mana yang tidak ketika aparat penegak hukum

menjalankan kewenangannya," jelas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa substansi RUU Perampasan Aset sebenarnya telah tersebar di berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Kejaksaan, dan sejumlah regulasi lainnya.

"Pasal-pasal yang sudah ada itu nanti dirunut, disusun kembali, dan dijadikan satu dalam undang-undang perampasan aset, bersama dengan KUHAP yang mengatur aparat penegaknya," imbuhnya.

Terkait mekanisme pembahasan, Hinca menuturkan bahwa DPR RI nantinya akan memutuskan apakah RUU Perampasan Aset dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI atau di Komisi III DPR RI.

"Seandainya diserahkan ke Komisi III oleh pimpinan DPR, kami siap juga," pungkasnya. **rdn**



FOTO: RDN/PDT

Rekomendasi Tata Kelola Pangan Nasional



Pimpinan Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, bersama tim saat melakukan kunjungan Panja ke Bulog Subang, Senin (8/9/2025).

Panitia Kerja (Panja) Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI tengah menyusun rekomendasi strategis terkait tata kelola pangan nasional. Pimpinan Panja, Alex Indra Lukman, menegaskan bahwa rekomendasi tersebut akan bersifat ganda: jangka pendek untuk pemerintah, serta jangka panjang sebagai masukan dalam revisi Undang-Undang Pangan.

Menurut Alex, kunjungan Panja ke Bulog Subang merupakan bagian dari mekanisme kerja legislatif dalam merumuskan kebijakan berbasis fakta di lapangan. Ia menekankan bahwa isu beras yang kini disebut-sebut langka perlu ditangani secara menyeluruh, tidak hanya di level harga, melainkan

juga distribusi dan stok. “Kita ingin seluruh elemen yang ada punya niat baik, diformulasikan dari hulu sampai hilir. Dengan begitu tata kelola beras dan jagung bisa lebih efektif dan adil,” ujarnya, Senin (8/9).

Salah satu isu penting yang menjadi perhatian adalah kebijakan Presiden yang menetapkan harga gabah Rp6.500 per kilogram untuk semua kualitas. Alex yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini menilai keputusan tersebut layak diapresiasi karena memberikan jaminan harga bagi petani. Namun, kebijakan itu belum terhubung dengan tata kelola hilir, termasuk harga eceran tertinggi (HET) beras.

Alex menegaskan, Panja DPR akan menekankan perlunya

Kita ingin seluruh elemen yang ada punya niat baik, diformulasikan dari hulu sampai hilir. Dengan begitu tata kelola beras dan jagung bisa lebih efektif dan adil

keterkaitan antara kebijakan hulu dan hilir agar keputusan harga gabah tidak berhenti pada level petani saja, tetapi berdampak positif pada seluruh rantai pasok pangan. “Kalau tidak terintegrasi, hasilnya hanya parsial dan berpotensi menimbulkan masalah baru,” tambahnya. **eno/aha**



Roadmap Pupuk Nasional Hadapi Perubahan Global



FOTO: ADI/PDT

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo saat unjungan Kerja Spesifik ke PT Pupuk Kujang, Karawang, Jawa Barat, Senin (8/9/2025).

Tim Komisi VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke PT Pupuk Kujang, Karawang, Jawa Barat. Kunjungan tersebut tidak hanya membahas ketersediaan pupuk bagi petani tetapi juga menggarisbawahi tantangan strategis jangka panjang yang dihadapi industri pupuk nasional.

Dalam dialog dengan jajaran direksi PT Pupuk Kujang, Komisi IV menyoroti perlunya antisipasi pergeseran tren global dari pupuk anorganik ke pupuk organik. Komitmen Indonesia pada Paris Agreement 2050 yang menargetkan penghapusan energi fosil akan berpengaruh terhadap industri pupuk yang selama ini

masih bergantung pada energi fosil.

“Panja Pupuk (Komisi IV) tidak bisa hanya bicara kondisi hari ini, tapi harus menyiapkan langkah antisipasi. Pemerintah bersama Pupuk Indonesia sudah memiliki *roadmap*, dan DPR siap memberi dukungan politik agar tahapannya bisa berjalan,” ungkap Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo

Kebijakan strategis ini penting karena menyangkut ketahanan pangan nasional dan daya saing Indonesia di pasar global

kepada **Parlementaria**, Senin (8/9/2025).

Ia menilai kebijakan strategis ini penting karena menyangkut ketahanan pangan nasional dan daya saing Indonesia di pasar global. “Kita harus pastikan bahwa kebutuhan pangan rakyat terpenuhi, namun di saat yang sama industri pupuk kita mampu beradaptasi dengan perubahan global,” tambah Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Kunjungan ke Pupuk Kujang tak hanya memastikan ketersediaan pupuk tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat arah kebijakan jangka panjang di sektor pertanian dan energi nasional.

adi/rdn



Scan QR untuk berita selengkapnya

Dukung Laju Pertumbuhan Ekonomi

Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko menyoroti rendahnya serapan anggaran kementerian dan lembaga yang menjadi mitra Komisi V DPR RI. Kondisi ini dinilai berpengaruh besar terhadap laju

pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah diminta mempercepat pelaksanaan program sejak kuartal pertama tahun berjalan.

“Karena penyerapan anggaran 2025 ini berpengaruh sekali dengan pertumbuhan ekonomi. Di tanggal 1 September tadi, hampir seluruh

kementerian tidak sampai 50 persen serapannya,” kata Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, dalam Rapat Kerja Komisi V dengan pemerintah di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9).

Politisi Fraksi PKB ini mengingatkan kementerian agar tidak menunda program yang bisa dijalankan lebih awal. Selain itu, Sudjatmiko juga menekankan pentingnya program padat karya dijalankan lebih awal. Program ini dianggap memiliki dampak langsung bagi masyarakat kecil karena menyerap banyak tenaga kerja.

“Program padat karya itu yang sekarang dilakukan baru berjalan di awal Agustus bahkan September. Kalau bisa di bulan Maret, April itu sudah bisa dijalankan di tahun depan. Karena anggaran ini langsung ke kelompok-kelompok kecil, sangat bermanfaat di tingkat bawah,” jelasnya.

Dalam rapat kerja itu, Komisi V dan pemerintah juga membahas perkembangan pagu efektif anggaran 2025 yang mendapat tambahan dari hasil buka blokir. DPR turut menyetujui penyesuaian dari pagu indikatif ke nota keuangan, serta memberikan persetujuan usulan tambahan pagu anggaran tahun 2026. —uc/rdn

Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko dalam Rapat Kerja Komisi V dengan pemerintah di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



FOTO: OJI/PDT

Sertifikasi Pembiayaan Bagi Koperasi

Anggota Komisi VI DPR RI Rizal Bawazier mendorong adanya mekanisme sertifikasi kelayakan pembiayaan bagi koperasi. Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Koperasi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta pada Senin (8/9). Menurutnya, sertifikat tersebut dapat menjadi acuan agar bank-bank Himbara tidak terbebani oleh risiko pinjaman bermasalah dari koperasi.

“Ini usulan untuk koperasi merah putih itu supaya tidak terjadi *non performing loan* dengan bank Himbara, supaya bagaimana apabila setiap koperasi itu dapat sertifikat

kelayakan pembiayaan,” ujar Rizal. Ia menekankan, dukungan pembiayaan semestinya difokuskan kepada koperasi yang sehat dan memiliki tata kelola baik. Sebaliknya, koperasi yang tidak kredibel sebaiknya tidak mendapat akses pendanaan agar tidak menimbulkan kerugian bagi

perbankan pelat merah.

“Itu penting, jadi ada koperasi-koperasi yang bagus yang seharusnya di-support terus, itu harusnya dapat sertifikat itu tapi kalau yang tidak benar ya sudah lah, tidak perlu dibantu. Kasian nanti bank Himbara jadi harus menanggung ya mengenai dana ini pak,” lanjut politisi Fraksi PKS itu kepada Menteri Koperasi RI, Budi Arie Setiadi.

Sebelumnya, legislator asal Dapil Jawa Tengah X itu juga menyoroti progres implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63 Tahun 2025 tentang penggunaan saldo anggaran lebih untuk mendukung bank yang menyalurkan pinjaman kepada koperasi Merah Putih. Menurutnya, dukungan pembiayaan tersebut belum merata dirasakan di daerah pemilihannya.

Ia meminta pemerintah terus memperbarui informasi terkait program tersebut, sekaligus mengencangkan sosialisasi agar masyarakat mengetahui mekanisme memperoleh permodalan dengan cepat. — **uc/aha**

Anggota Komisi VI DPR RI Rizal Bawazier dalam rapat kerja dengan Menteri Koperasi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta pada Senin (8/9/2025).



FOTO: FHN/PDT



Scan QR untuk berita selengkapnya

Fokus Revisi UU Antimonopoli

Revisi UU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menata ulang iklim persaingan usaha. Kini, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah memasuki tahap penyusunan naskah akademik dan draf RUU.

Sebab itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan perlunya penguatan aspek kelembagaan hingga penajaman definisi hukum agar regulasi ini mampu menjawab tantangan persaingan usaha di era digital. Demikian hal ini disampaikan dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9).

“Penguatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah kunci. Lembaga ini harus memiliki kewenangan yang memadai untuk mengatasi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,” ujar Adisatrya saat membuka forum.

Menurut Adisatrya, salah satu isu utama dalam revisi regulasi ini adalah soal penegakan hukum. KPPU, sebagai lembaga pengawas persaingan, kerap menghadapi keterbatasan kewenangan dalam menindak pelanggaran. DPR menilai, tanpa penguatan kelembagaan, praktik monopoli yang merugikan konsumen maupun pelaku usaha kecil akan sulit diberantas.

Penguatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah kunci. Lembaga ini harus memiliki kewenangan yang memadai untuk mengatasi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Isu lain yang menjadi sorotan adalah kebutuhan akan definisi yang lebih komprehensif. Menurutnya, UU yang berlaku saat ini masih belum memberikan batasan jelas terkait istilah kunci, seperti monopoli, dominasi pasar digital, maupun persaingan usaha tidak sehat.

Hal ini penting terutama di tengah perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat. Dominasi perusahaan besar berbasis *platform* digital berpotensi menekan pemain kecil jika tidak ada regulasi yang kuat.

Selain itu, Adisatrya juga menyoroti implikasi revisi UU ini terhadap ekosistem bisnis secara luas, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

um/aha

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).



FOTO: FHN/PDT

Scan QR untuk berita selengkapanya





FOTO: RRI/PDT

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, bersama tim usai pertemuan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Kantor RRI Palembang, Jumat (12/9/2025).

Sebagai upaya mendukung transformasi Radio Republik Indonesia (RRI) agar terus relevan dalam menghadapi tantangan digital, Komisi VII DPR RI berkomitmen akan terus mendorong Rancangan Undang-Undang Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) masuk prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.

“Harapannya pada 2026 bisa naik ke prioritas, lalu dibahas lebih lanjut di Komisi VII,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, saat kunjungan ke Kantor RRI Palembang, Jumat (12/9).

Tidak hanya bagi RRI, RUU RTRI diharapkan menjadi dasar hukum penggabungan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) tersebut dengan TVRI dalam satu sistem penyiaran publik negara, sehingga mampu bersaing dengan media swasta.

Transformasi RRI lewat RUU RTRI

Ketertanggung terhadap APBN ini akan diatur dalam RUU RTRI, dengan membuka ruang komersial lebih luas namun tetap menjaga independensi lembaga penyiaran publik

Lamhot mengatakan RUU RTRI juga akan membuka ruang komersial yang lebih luas bagi kedua lembaga tersebut. Ruang komersial

sendiri bagi LPP agar mampu bersaing dengan swasta, mengingat selama ini ketergantungannya pada APBN membuat kinerjanya rentan terganggu.

“Ketertanggung terhadap APBN ini akan diatur dalam RUU RTRI, dengan membuka ruang komersial lebih luas namun tetap menjaga independensi lembaga penyiaran publik,” jelasnya.

Perlu diketahui saat ini RUU RTRI masih dalam daftar Prolegnas. RUU RTRI sendiri akan disiapkan sebagai tindak lanjut dari revisi UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang saat ini tengah dibahas di Komisi I DPR RI. **rr/aha**



Tak Ada Lagi Pendidikan Anak yang Tertinggal



Anggota Komisi VIII DPR RI Sigit Purnomo saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 10 Bogor, di Kabupaten Bogor pada Rabu (10/9/2025).

Anggota Komisi VIII DPR RI Sigit Purnomo, menegaskan pentingnya kehadiran Sekolah Rakyat sebagai jawaban atas masih tingginya angka putus sekolah di Indonesia. Menurutnya, negara harus hadir untuk memastikan tidak ada lagi anak bangsa yang kehilangan kesempatan menempuh pendidikan hanya karena faktor ekonomi maupun keterbatasan lainnya.

“Target kita adalah bagaimana angka putus sekolah bisa menjadi nol. Tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang tidak sekolah, apapun alasannya. Maka negara hadir melalui Sekolah Rakyat,” ujar Sigit Purnomo usai mengikuti

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 10 Bogor, di Kabupaten Bogor pada Rabu (10/9).

Lebih lanjut, Sigit menekankan agar Sekolah Rakyat tidak hanya hadir sebagai simbol, tetapi juga benar-benar mampu menjawab kebutuhan pendidikan berkualitas. Ia menyoroti pentingnya sarana dan prasarana (sarpras), kualitas guru, kurikulum, hingga pendampingan tenaga pengajar agar generasi muda yang dilahirkan bisa tumbuh menjadi generasi unggul.

Sigit juga mengingatkan agar tidak terjadi dikotomi antara sekolah negeri, swasta, maupun Sekolah Rakyat. Menurutnya, perbedaan label sekolah jangan sampai

menciptakan stigma bahwa Sekolah Rakyat hanya diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin.

“Kita sangat optimis ke depan dari Sekolah Rakyat akan lahir calon-calon pemimpin bangsa, sebagaimana dulu lahirnya tokoh-tokoh besar seperti Ki Hajar Dewantara atau Dewi Sartika dari sekolah rakyat,” tegas Legislator Fraksi PAN ini.

Dengan tekad tersebut, Sigit Purnomo berharap kehadiran Sekolah Rakyat dapat menjadi tonggak penting dalam menciptakan pendidikan yang inklusif, adil, dan merata, sekaligus melahirkan generasi penerus bangsa yang siap menjaga keberlanjutan pembangunan Indonesia. **blf/aha**



Ancaman Ketahanan Keluarga Nasional

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menegaskan ketiadaan anggaran untuk alat obat dan kontrasepsi (Alokon) dalam pagu anggaran 2026 menjadi tanda bahaya bagi pembangunan ketahanan keluarga. Menurutnya, persoalan ini dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan perempuan, anak, hingga ketahanan nasional.

“Kehamilan yang tidak direncanakan akan berdampak signifikan pada tingginya angka kematian ibu, aborsi tidak aman,

kemiskinan, dan penurunan kualitas hidup perempuan Indonesia,” tegas Netty dalam Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9).

Ia mengingatkan, saat ini terdapat sekitar 30 juta perempuan usia 15–49 tahun di Indonesia, namun 19 persen diantaranya belum memiliki akses kontrasepsi modern. Artinya, hampir 7 juta perempuan tidak terlayani kebutuhan kontrasepsinya.

“Dari 7,91 juta kehamilan setiap tahun, sekitar 2,8 juta atau

38 persen merupakan kehamilan tidak diinginkan. Kondisi ini sudah membuat Indonesia tercatat sebagai negara dengan tingkat kehamilan tidak diinginkan tertinggi di Asia Tenggara. Ini sinyal alarm yang berbahaya, jelasnya.

Netty menambahkan, jika pada 2023 angka kematian ibu sudah mencapai 305 per 100 ribu kelahiran meski masih ada Alokon, maka pada 2026 tanpa dukungan anggaran justru akan semakin melonjak. Ia menilai, dampak finansial akibat tidak tersedianya kontrasepsi juga sangat besar.

“Kalau tidak dialokasikan, dampaknya lebih mahal. Biaya persalinan bisa mencapai 3,2 triliun, ditambah penanganan aborsi bermasalah sekitar 3,2 triliun. Jadi total 6,5 triliun. Sementara kebutuhan alokon hanya sekitar 1 triliun. Rasanya kita semua harus mendukung penambahan anggaran ini,” tegas politisi PKS tersebut. — gal/aha



FOTO: ENO/PDT



Scan QR
untuk berita
selengkapnya

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani dalam Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Tambah Jumlah Penerima KIP

Berdasarkan data Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi Kemendiknasaintek, hingga Juni 2025 tercatat 921.000 pemohon KIP Kuliah, sementara kuota yang tersedia hanya 200.000. Artinya lebih dari 700.000 calon mahasiswa tidak terakomodasi.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Kadafi mendesak Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Kemendiknasaintek) untuk menambah jumlah penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Menurutnya, langkah ini penting agar lulusan SMA sederajat memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Jumlah pemohon KIP Kuliah terus meningkat, tetapi kuota yang tersedia tetap. Akibatnya banyak adik-adik kita gagal melanjutkan kuliah karena alasan biaya

“Jumlah pemohon KIP Kuliah terus meningkat, tetapi kuota yang tersedia tetap. Akibatnya banyak adik-adik kita gagal melanjutkan kuliah karena alasan biaya,” ujar Kadafi, saat rapat dengan Menteri Pendidikan Sainstek di Ruang Rapat Komisi X, Gedung DPR, Rabu (3/9).

Kadafi menegaskan KIP Kuliah merupakan instrumen penting

untuk menjamin hak pendidikan tinggi bagi seluruh anak bangsa. Karena itu, penambahan kuota mendesak dilakukan agar tidak menimbulkan ketidakadilan

Aspirasi serupa, katanya, juga disampaikan para rektor PTN

maupun PTS yang menghadapi banyak mahasiswa membutuhkan bantuan. Selain penambahan kuota, Kadafi menekankan perlunya penyederhanaan prosedur pengajuan KIP.

Ia menyoroti masih banyak kampus swasta di daerah yang kesulitan dengan birokrasi dan persyaratan teknis, apalagi dengan keterbatasan akses internet. “Jangan sampai niat membantu justru menjadi beban karena prosesnya berbelit. Proses ini harus disederhanakan,” tegasnya. — **tn/aha**



Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Kadafi.



Scan QR untuk berita selengkapnya

FOTO: MRI/PDT

RUU Sisdiknas Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Revisi Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) masih terus dibahas DPR bersama pemerintah. Hal itu disampaikan Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Ia menyebut, hingga kini Komisi X DPR RI masih menerima

RUU Sisdiknas dirancang untuk peningkatan akses dan kesetaraan pendidikan. UU ini diharapkan akan membuka akses kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh pendidikan tinggi yang berkualitas. “Kami ingin UU Sisdiknas nantinya bukan hanya fokus pada peningkatan mutu pendidikan tinggi,

hingga ruang gerak yang lebih luas untuk melakukan inovasi dan berkolaborasi. Menurutnya, kebijakan yang diatur dalam UU Sisdiknas tidak akan berhasil apabila perguruan tinggi swasta tidak dilibatkan.

Terkait, perkembangan Revisi UU Sisdiknas, ia menyatakan masih



Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian (kanan) saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Iluni FHUI, IKA USU, ABP PTSI di Ruang Rapat Komisi X, Gedung DPR, Rabu (10/9/2025). Foto: Mri/Pdt

banyak masukan terkait RUU Sisdiknas.

Dalam RUU tersebut, banyak masukan dari berbagai lembaga, pemerhati pendidikan, dan stakeholder lainnya. Pembahasan RUU Sisdiknas juga meliputi berbagai aspek, mulai dari biaya pendidikan, hingga inklusivitas.

Fokus pertama terkait peningkatan kualitas perguruan tinggi, Hetifah menjelaskan

namun kualitas lulusannya juga harus berdampak pada mobilitas sosial dan kesenjangan ekonomi,” tuturnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Iluni FHUI, IKA USU, ABP PTSI di Ruang Rapat Komisi X, Gedung DPR, Rabu (10/9).

Lebih lanjut, ia mengemukakan UU Sisdiknas juga akan mengatur mengenai profesionalitas profesi dosen hingga tenaga pendidikan terkait peningkatan kesejahteraan

mematangkannya di Komisi X DPR RI. “Kami masih akan melakukan beberapa pendalaman, diskusi dan konsultasi publik pada masa sidang ini. Setelah itu dilakukan harmonisasi dengan Badan Legislasi DPR dan selanjutnya diresmikan sebagai RUU inisiatif DPR, dan kemudian dikirim kepada pemerintah untuk mulai dibahas bersama,” ujarnya.

tn/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



Pemerintah Harus Perkuat Investasi

Anggota Komisi XI DPR RI Amin menyoroti target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 yang dipatok pemerintah sebesar 5,4 persen. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan terkait Pengantar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan Tahun 2026 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9).

Amin menilai proyeksi pertumbuhan tersebut perlu diimbangi dengan strategi peningkatan investasi yang lebih agresif. Sebab, berdasarkan komposisi pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga selama ini masih menjadi penyumbang terbesar, sementara peran investasi justru menunjukkan tren penurunan.

“Pertumbuhan ekonomi kita tahun depan ditargetkan 5,4 persen, dengan konsumsi rumah tangga 5,2 persen, investasi 5,2 persen, dan ekspor 6,7 persen. Selama ini kontribusi terbesar berasal dari konsumsi rumah tangga, sekitar 54 persen, lalu sekitar 30 persen dari investasi, sisanya dari belanja pemerintah serta ekspor-impor,” ujar Amin.

Menurutnya, penurunan proyeksi pertumbuhan investasi dari 5,5 persen pada tahun sebelumnya menjadi 5,2 persen pada 2026 perlu menjadi perhatian serius. Ia menekankan pentingnya langkah konkret untuk menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam negeri maupun asing.

“Mestinya ada strategi yang lebih optimistis agar investasi

swasta, peran BUMN, maupun *Foreign Direct Investment* (FDI) bisa masuk ke Indonesia sebesar-besarnya. Dengan begitu kontribusi investasi terhadap pertumbuhan bisa meningkat signifikan, sehingga target pertumbuhan ekonomi 6–7 persen yang disampaikan bisa tercapai,” tegas Amin.

Penurunan proyeksi pertumbuhan investasi dari 5,5 persen pada tahun sebelumnya menjadi 5,2 persen pada 2026 perlu menjadi perhatian serius

Anggota Komisi XI DPR RI Amin.

Meski begitu, ia mengapresiasi proyeksi peningkatan kontribusi ekspor dari 5,4 persen menjadi 6,7 persen. Namun, Amin mengingatkan bahwa tantangan global, baik dari sisi politik maupun ekonomi, bisa menjadi hambatan dalam mewujudkan target tersebut.

we/aha



FOTO: MRO/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnyanya





FOTO: MRO/PDT

Anggota Komisi XI DPR RI Sohibul Iman dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Soroti Kebijakan Penghapusan Utang UMKM

Anggota Komisi XI DPR RI Sohibul Iman menyoroti rencana pelaksanaan program penghapusan utang macet bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta postur defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Sorotan itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (10/9).

Walaupun ia mengapresiasi optimisme Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang selalu berpegang pada *lead economic index* yang menjadi acuan kebijakan, dirinya tetap menekankan perlunya kejelasan terkait implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 mengenai penghapusan utang macet UMKM.

Sohibul menilai evaluasi program ini penting sebab UMKM menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat,

khususnya mereka yang tidak bekerja di sektor formal. Ia pun juga mendorong koordinasi lebih lanjut dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang hingga kini belum menerbitkan Peraturan OJK terkait akses pembiayaan UMKM.

Tidak hanya soal UMKM, Politisi Fraksi Partai NasDem itu menyoroti defisit RAPBN 2026 yang dirancang sebesar Rp638,8 triliun. Ia mengingatkan agar strategi pertumbuhan ekonomi lebih banyak digerakkan oleh dunia usaha dan swasta.

Sebagai informasi, dalam RAPBN 2026, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.147,7 triliun, sementara belanja negara direncanakan sebesar Rp3.786,5 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran dipatok Rp638,8 triliun atau sekitar 2,48 persen dari produk domestik bruto (PDB).

um/aha



Tata Kelola Sampah

Anggota Komisi XII DPR RI Aqib Ardiansyah menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan tata kelola sampah nasional yang lebih terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat. Aqib menekankan bahwa persoalan sampah sudah berlangsung selama bertahun-tahun, namun hingga kini belum terselesaikan secara optimal akibat ketiadaan rencana yang terukur dan berkesinambungan. Menurut Aqib, instruksi Presiden yang menempatkan isu sampah sebagai agenda strategis nasional perlu dijadikan momentum bagi semua pihak untuk melakukan langkah konkret dan percepatan.

Persoalan sampah sudah berlangsung selama bertahun-tahun, namun hingga kini belum terselesaikan secara optimal akibat ketiadaan rencana yang terukur dan berkesinambungan

“Ya untuk tata kelola sampah kita dorong, kita percepat, kita kawal sampai program Pak Presiden itu betul-betul tersampai zero sampah untuk berikutnya,” ujar Aqib dalam Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup/BPLH, di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9).

Selain menyoroti isu sampah, Legislator Fraksi PAN tersebut

juga menekankan pentingnya tata kelola sektor pertambangan yang lebih baik dan berpihak pada kepentingan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan. Ia mengapresiasi kinerja Kementerian Lingkungan Hidup, khususnya jajaran penegakan hukum (Gakkum) dan para deputy yang selama ini aktif melakukan mitigasi dan penertiban

terhadap praktik pertambangan yang tidak sesuai aturan.

Lebih lanjut, Aqib menyampaikan apresiasi atas kinerja Menteri Lingkungan Hidup beserta seluruh jajaran yang selama ini dinilainya sebagai mitra kerja paling kolaboratif dan memiliki tingkat sinergitas yang tinggi dibanding kementerian lain. Menurutnya, sejumlah program kerja Kementerian sudah mulai menunjukkan hasil yang positif dan dirasakan masyarakat secara langsung. — **pun/aha**

Anggota Komisi XII DPR RI Aqib Ardiansyah dalam Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup/BPLH, di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).



FOTO: JKA/PDT





FOTO: RSB/PDT

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya saat mengikuti RDPU Komisi XIII dengan masyarakat perkawinan campuran (Perca) Indonesia di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Prioritaskan Hak Kewarganegaraan

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menekankan dua hal fundamental yang harus menjadi perhatian dalam persoalan perkawinan campur, yaitu soal hak kewarganegaraan dan kepastian hukum. Ia menilai banyak warga yang lahir dari darah Indonesia justru tidak diakui status kewarganegaraannya, bahkan sebagian di antara mereka telah berjasa mengharumkan nama bangsa.

“Bayangkan, mereka lahir berdarah Indonesia, bahkan ada yang mengharumkan nama Indonesia, lalu kemudian tidak

diakui. Itu kan tidak boleh. Kita tidak boleh zalim,” tegas Willy kepada **Parlementaria** usai mengikuti RDPU Komisi XIII dengan masyarakat perkawinan campuran (Perca) Indonesia di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9).

Willy menjelaskan, Komisi XIII DPR akan mengambil langkah jangka pendek dan jangka panjang untuk menangani persoalan ini. Untuk jangka pendek, pihaknya akan menggelar rapat kerja bersama Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen Administrasi Hukum Umum, serta Dirjen Imigrasi guna menuntaskan persoalan mendesak, seperti warga yang sudah memiliki

paspor campuran namun belum memperoleh paspor Indonesia.

Sementara untuk jangka panjang, Komisi XIII akan menginisiasi revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Dalam prosesnya, DPR berkomitmen melibatkan masyarakat perkawinan campuran Indonesia (PERCA) sebagai narasumber untuk memberi masukan langsung terkait masalah yang dihadapi. “Kami akan kategorikan dan masukkan materi muatan tentang perkawinan campur ke dalam revisi Undang-Undang Kewarganegaraan. Kita usahakan secepatnya, karena ini juga berkaitan dengan naturalisasi,” jelasnya.

Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga menyoroti banyaknya permohonan kewarganegaraan yang hingga kini masih tertunda. Ia meminta data dari PERCA Indonesia agar DPR dapat menelusuri penyebab mandeknya permohonan tersebut. **gal/rdn**



Jambi Butuh Rutan Baru

Rumah tahanan (Rutan) jadi kebutuhan mendesak di Provinsi Jambi untuk menempatkan para tersangka yang kasus hukumnya masih diproses di pengadilan. Selama ini, para tahanan kasus pidana dititipkan di lembaga pemasyarakatan yang bercampur dengan warga binaan.

Hal ini terungkap saat Komisi XIII DPR RI menggelar rapat dengan otoritas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DJP) Jambi di Kota Jambi, Jumat (12/9). “Di Jambi ini tidak ada rutan. Ada rutan, tapi 12 jam jauhnya. Jadi, untuk orang sidang butuh 12 jam ke pengadilan,” ungkap Anggota Komisi XIII DPR Mafirion, usai memimpin rapat di Kantor DJP Jambi.

Kebutuhan pembangunan Rutan di Jambi sangat mendesak untuk kelancaran proses hukum. Komisi XIII, kata Mafirion, sangat mendukung usulan ini untuk kemudian dibahas dan dianggarkan pembangunannya. “Soal Rutan ini sudah mendesak. Harus

dibangunkan Rutan agar proses peradilan pidana dan lainnya dapat berjalan baik untuk penahanan sementara mereka,” ucap politisi PKB ini.

Sebetulnya ada dua pilihan menyangkut isu ini. Selain membangun Rutan baru, dalam rapat tersebut sempat diusulkan alternatif pilihan, yaitu membangun Lembaga pemasyarakatan (Lapas) baru di Jambi yang selama ini sudah over kapasitas. Dan Lapas lamanya bisa digunakan untuk Rutan.

Mafirion menyampaikan, selain over kapasitas, Lapas di Jambi juga banyak yang sudah tidak layak huni.

Banyak bangunan fisik Lapas di Provinsi Jambi yang rusak. Bahkan, lanjut Mafirion, ada Lapas yang dilalui aliran sungai yang rentan amblas dan banjir bila hujan turun. Di sinilah Lapas perlu direlokasi dan bangunan lamanya bisa dimanfaatkan untuk Rutan, tempat penahanan sementara para tersangka yang sedang menjalani proses peradilan. —mh/aha

Anggota Komisi XIII DPR Mafirion, memimpin rapat di Kantor DJP Jambi, Jumat (12/9/2025).



FOTO: MH/PDT



RUU PPRT Hadiah untuk PRT



Anggota Baleg DPR RI Selly Andriany Gantina dalam RUU PPRT. Dalam RDP/RDPU BALEG DPR RI bersama Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan, di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (8/9/2025).

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembahasan

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Anggota Baleg DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyampaikan bahwa RUU tersebut telah menjadi usulan sejak periode-periode sebelumnya, dan kali ini DPR bertekad menjadikannya sebagai hadiah bersejarah bagi para pekerja rumah tangga (PRT) yang selama ini kerap luput dari perlindungan hukum.

“Mudah-mudahan di masa persidangan ini bisa menjadi

Pekerja rumah tangga memiliki peran vital dalam sektor informal dan memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan keluarga di Indonesia. Namun, posisi mereka selama ini masih rentan

hadiah untuk masyarakat, khususnya pekerja rumah tangga,” ujar Selly dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan,

dan BPJS Ketenagakerjaan, Senin (8/9).

Menurut Selly, pekerja rumah tangga memiliki peran vital dalam sektor informal dan memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan keluarga di Indonesia. Namun, posisi mereka selama ini masih rentan karena tidak diatur secara komprehensif dalam regulasi ketenagakerjaan. Dengan disahkannya RUU PPRT, Selly berharap hak-hak dasar PRT, termasuk jaminan sosial dan perlindungan kerja, dapat dijamin oleh negara.

Selain fokus pada substansi RUU, DPR juga menegaskan pentingnya keterbukaan akses informasi terkait proses legislasi. Selly menyebut hal ini sejalan dengan komitmen transformasi DPR menuju lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

“Bentuk keterbukaan ini penting, agar masyarakat bisa mengakses produk legislasi dengan mudah. Adanya *meaningful participation* dan pernyataan-pernyataan dari anggota maupun pimpinan DPR adalah wujud akses keterbukaan itu,” tegasnya.

Ia menambahkan, dengan adanya akses informasi yang luas, masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok pekerja dapat turut memberikan masukan dalam setiap tahapan pembahasan undang-undang.

RUU PPRT sendiri telah masuk dalam Prolegnas Prioritas. Jika disahkan, undang-undang ini akan menjadi tonggak penting pengakuan dan perlindungan terhadap jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia, sekaligus memperkuat komitmen negara dalam menjamin hak-hak pekerja di sektor informal. **fa/aha**





Komisi VIII DPR RI mengunjungi Sekolah Rakyat di Banten dan Bogor untuk melihat langsung penyelenggaraan sekolah yang didirikan dengan tujuan memberikan pendidikan kepada semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu dan tinggal di daerah terpencil. Foto : uc, bun/bia

Beranda Ami



SCAN ME



SAKSIKAN HANYA DI
[HTTPS://TVRPARLEMEN.DPR.GO.ID](https://tvrparlemen.dpr.go.id)

 **TVR PARLEMEN**